

BAB I

PENDAHULUAN

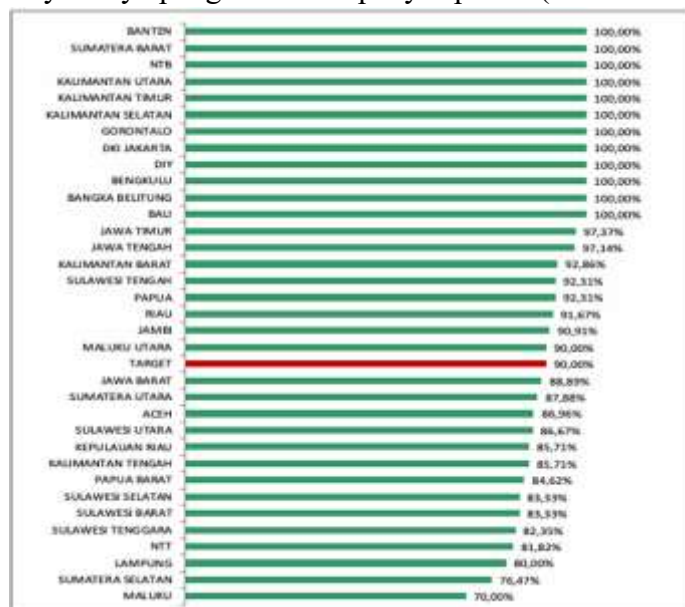
A. Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian di puskesmas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, karena berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ruang lingkup kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai serta kegiatan Pelayanan Farmasi Klinik. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dari proses perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efektif, efisien, dan rasional dalam pelayanan kesehatan (Permenkes RI, 2016)

Pengelolaan obat di Puskesmas merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kefarmasian dan menjadi faktor yang membuat tingginya anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas (Sulistiyowati, Dianati and Indrayanti, 2020). Hampir 40-50% kebutuhan logistik di Puskesmas sebagian besar adalah obat-obatan dan alat kesehatan dimana persediaan obat di Puskesmas dapat menyerap anggaran hingga 70% (Yuswantina *et al.*, 2022), sehingga ketidakefisienan pengelolaan obat akan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasional Puskesmas. Selain itu, pengelolaan obat yang tidak dijalankan sesuai prosedur menyebabkan masalah seperti kekosongan obat, obat menumpuk akibat perencanaan obat yang tidak

sesuai, tumpang tindih anggaran, serta berisiko obat kadaluwarsa, rusak hingga *dead stock* yang mana dapat mengganggu pelayanan farmasi serta pasien tidak mendapatkan pengobatan secara maksimal sehingga mutu pelayanan puskesmas berkurang.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam pengelolaan logistik obat, karena perencanaan obat yang belum efektif dan kurang efisien berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan. Perencanaan sediaan farmasi harus terlebih dahulu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat. Sukses atau gagalnya pengelolaan obat ditentukan oleh kegiatan di dalam perencanaan obat yang dibuat. Perencanaan obat yang tidak optimal mengakibatkan kekacauan pada siklus manajemen secara keseluruhan, yang menimbulkan pemborosan dalam penganggaran, membengkaknya biaya pengadaan dan penyimpanan (Ramadhani, 2023).

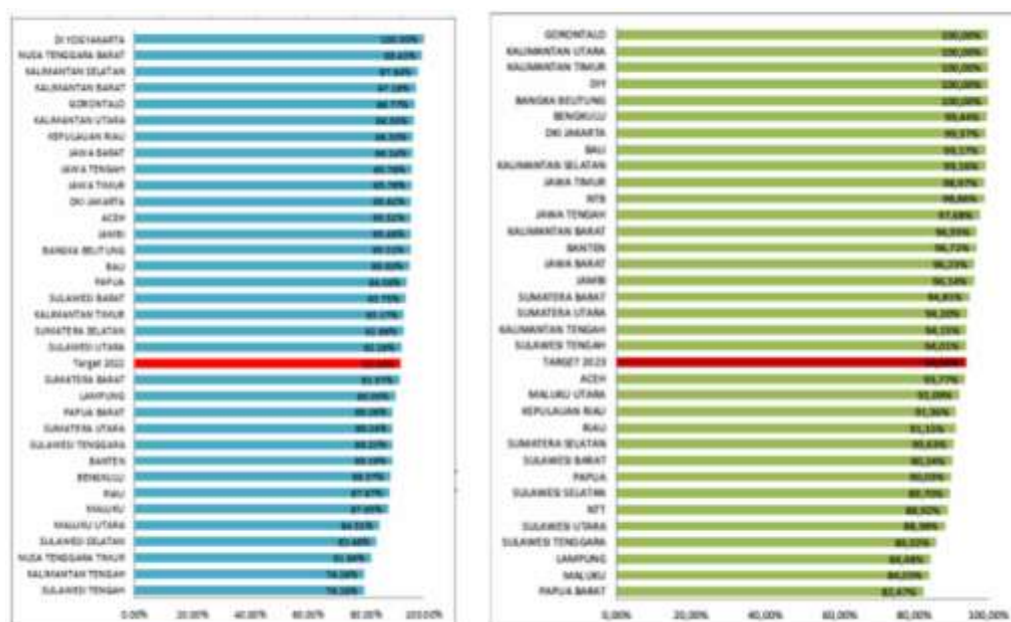


Sumber: Laporan Kinerja Direktorat P2K Kemenkes, 2023

Gambar 1.1

Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian Alat Kesehatan tahun 2023 (Gambar 1.1), nilai capaian kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar dengan capaian tertinggi 100% dicapai oleh dua belas provinsi. Akan tetapi, terdapat 14 provinsi salah satunya Jawa Barat (88%) dengan capaian persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar dibawah target nasional (90%).



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat P2K Kemenkes, 2023

Gambar 1.2
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di 34
Provinsi Tahun 2022-2023

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2023 sebanyak 14 provinsi belum mencapai target capaian nasional (94%) puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, hal ini serupa dengan tahun 2022 yang mana terdapat 14 provinsi yang belum mencapai target nasional (92%), ini menunjukkan bahwasannya ketersediaan obat di Indonesia masih belum merata. Disamping itu, terdapat

permasalahan-permasalahan terkait obat di Indonesia, diantaranya pelaksanaan manajemen obat yang belum efektif yang disebabkan obat yang mengalami kekosongan, kadaluwarsa/rusak, sarana dan prasarana obat belum memadai, SDM yang belum memadai serta belum pernah dilakukan pelatihan terkait pengelolaan obat, dan pengelolaan obat yang tidak sesuai dengan standar.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola penyakit, dan perkembangan regulasi kesehatan dari pemerintah, puskesmas dituntut dapat menyesuaikan dan meningkatkan sistem pengelolaan obat yang lebih efisien dan sesuai standar. UPTD Puskesmas Kahuripan merupakan salah satu puskesmas yang telah berstatus BLUD dan terletak secara strategis di pusat kota yakni di kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, dalam menjalankan pelayanan kesehatan puskesmas kahuripan masih mengalami beberapa permasalahan terutama dalam pengelolaan obat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei pendahuluan kepada UPTD Puskesmas Kahuripan menunjukkan bahwa dalam tahun 2023, terdapat kekosongan pada obat esensial seperti obat Diazepam, Dihidroartemisin+Piperakuin (DHP) dan Primaquin, Diazepami Injeksi, Betametason, dan Amoksisilin Sirup. Selain itu, terdapat 13 item obat kadaluwarsa dengan total keseluruhan sebanyak 26.016 obat. Didapatkan pula *dead stock* pada obat sediaan sirup dan 11 item obat selain sediaan sirup. Selain itu, hasil telaah dokumen yang didapat dari Puskesmas Kahuripan menunjukkan bahwa jumlah item obat yang tersedia atau terpenuhi sebanyak 70,8% dari 160 item obat yang direncanakan pada tahun 2023. Hal tersebut jauh dari standar

ketersediaan obat yang di rekomendasikan oleh WHO (90%) dan Kemenkes (95%). Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya perencanaan obat yang matang.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pasien yang berobat di Puskesmas Kahuripan berinisial (S) yang di diagnosa penyakit dermatitis seboroik menyatakan bahwasannya dalam pengambilan obat terdapat kendala yaitu tidak selalu terpenuhinya jenis obat yang diresepkan sehingga perlu membeli diluar Puskesmas Kahuripan. Pada wawancara yang dilakukan pada pihak apoteker Puskesmas Kahuripan, menyatakan bahwasannya di Puskesmas Kahuripan sering terdapat pemberian *copy* resep untuk obat yang tidak tersedia atau kosong di Puskesmas berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter.

Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin (2019) Studi tentang Ketersediaan Obat di Puskesmas Meo-Meo Kota Baubau, mengidentifikasi bahwa ketersediaan obat di Puskesmas Meo-Meo belum sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan data kesesuaian perencanaan pengadaan obat, tahap pemilihan obat serta tahap kompilasi pemakaian obat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono, dkk (2020) mengenai Dampak Kebijakan Pengadaan Obat Pada Puskesmas di Jakarta Era Jaminan Kesehatan Nasional, dari 21 puskesmas di Jakarta yang melakukan pengadaan *e-Purchasing*, 10 diantaranya gagal melakukan pengadaan sehingga terjadi kekosongan obat yang berdampak pada rerata proporsi rujukan pasien hipertensi hingga 12% atau 4 kali lipat dari puskesmas yang tidak mengalami kekosongan obat serta meningkatkan pengeluaran biaya obat sebesar 40%.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasniati (2022) mengenai Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone Tahun 2022 terdapat kekosongan jenis obat yang dibutuhkan, serta kerusakan obat. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat pengelolaan obat yang kurang memenuhi standar pelayanan kefarmasian salah satunya pada aspek perencanaan obat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan obat di UPTD Puskesmas Kahuripan terutama dalam aspek perencanaan dengan judul “Perencanaan Obat BLUD di UPTD Puskesmas Kahuripan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Perencanaan Obat BLUD di UPTD Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya tahun 2024?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan perencanaan obat BLUD di UPTD Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui cara pemilihan jenis obat di UPTD Puskesmas Kahuripan.
- b. Untuk mengetahui kompilasi penggunaan obat di UPTD Puskesmas Kahuripan.

- c. Untuk mengetahui perhitungan kebutuhan obat di UPTD Puskesmas Kahuripan.
- d. Untuk mengetahui proyeksi kebutuhan obat di UPTD Puskesmas Kahuripan.
- e. Untuk mengetahui penyesuaian rencana pengadaan obat di UPTD Puskesmas Kahuripan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya mendeskripsikan perencanaan obat yang meliputi proses pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan obat, proyeksi penyesuaian obat, penyesuaian rencana pengadaan obat.

2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan telaah dokumen.

3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Administrasi Kebijakan Kesehatan.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah Kepala UPTD Puskesmas Kahuripan, Penanggungjawab Obat Puskesmas/Apoteker, Asisten Apoteker, dan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September– Desember 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Membantu memberikan pemahaman mengenai manajemen obat terutama dalam tahap perencanaan dan praktik kefarmasian di puskesmas.
- b. Memberikan kesempatan mendalami bidang peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan terutama dalam hal pengelolaan obat pada aspek perencanaan di puskesmas.
- c. Memberikan pengalaman dalam mengali informasi.

2. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi dan pustaka bagi dosen dan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat mengenai pengelolaan obat pada aspek perencanaan di Puskesmas.

3. Bagi Instansi Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan saran bagi UPTD Puskesmas Kahuripan dalam perencanaan obat.
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan perencanaan obat bagi UPTD Puskesmas Kahuripan.

- c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian puskesmas.
- d. Sebagai sumber data dan referensi pendukung untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan terutama dalam kegiatan pelayanan kefarmasian bagi UPTD Puskesmas Kahuripa